



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PIUS LUSTRILANANG
2. Jabatan : ANGGOTA II BPK RI
3. NHK : 97607

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.340.602.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m<sup>2</sup>/383.96 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 609.722.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 35.24 m<sup>2</sup>/29.37 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.430.880.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m<sup>2</sup>/94 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.877.328.000

1. MOBIL, BMW 520I Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 506.750.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 470.578.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 381.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 540.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.145.522.179**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 9.284.452.179**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.284.452.179

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.